
DINAMIKA PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI PEKANBARU: TANTANGAN, STRATEGI ADAPTASI, DAN DAMPAK SOSIAL

Irdayanti Irdayanti¹, Fitria Ramadhani Agusti Nst²

^{1,2}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Penulis Korespondensi: irdayanti@uin-suska.ac.id

Abstract

Education is a right for every individual in the world, and countries are responsible for providing it. However, this is not the case for foreign refugee children. They face difficult situations, so education is not a top priority in their lives as refugees. Indonesia, as a transit country for many foreign refugees, strives to provide them with educational opportunities. This study attempts to explore the obstacles and adaptation strategies faced by refugee children in the formal education process in Pekanbaru. This study uses qualitative research methods and a case study approach. There were 10 informants interviewed, namely refugee children, employees of the Pekanbaru City Education Office, and teachers who teach refugee children. In addition, other data sources were obtained from journal articles downloaded from the Publish or Perish application. The results of the study show that there are four factors that hinder the education process of refugee children in Pekanbaru, they are legal factors, facilities, society, and culture and three adaptation strategies implemented in the education of refugee children, namely general policies, technical services, and program monitoring.

Keywords: Refugee Children's Education, Barriers and Adaptation Strategies

Abstrak

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu di dunia dan negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakannya. Namun tidak demikian dengan anak pengungsi luar negeri. Mereka dihadapkan pada situasi sulit sehingga Pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam menjalani kehidupan di pengungsian. Indonesia sebagai negara transit bagi banyak pengungsi luar negeri berupaya untuk memberikan kesempatan Pendidikan tersebut. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi hambatan dan strategi adaptasi yang dihadapi oleh anak pengungsi dalam proses Pendidikan formal di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Terdapat 10 informan yang diwawancarai yaitu anak pengungsi, pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan para guru yang mengajar anak pengungsi. Selain itu sumber data lain didapat dari artikel jurnal yang diunduh dari aplikasi *Publish of Perish*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penghambat proses pendidikan anak pengungsi di Pekanbaru, yaitu faktor hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Terdapat tiga strategi adaptasi yang dilakukan dalam Pendidikan anak pengungsi yaitu kebijakan umum, pelayanan teknis dan monitoring program.

Kata Kunci: Pendidikan Anak Pengungsi, Hambatan dan Strategi Adaptasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perkembangan kehidupan seorang individu dan penentu tingkat kemakmuran sebuah negara. Sehingga setiap negara menyelenggarakan pendidikan dengan baik yang berorientasi kepada masa depan untuk masyarakatnya. Namun, ketika isu ini dihubungkan dengan pengungsi tentu menjadi cerita yang berbeda. Para pengungsi yang hidup di pengungsian dengan keterbatasan dan penantian selama bertahun-tahun menimbulkan masalah baru yaitu pendidikan bagi anak-anak pengungsi yang telah memasuki usia wajib belajar. Jika merujuk pada The United Nations Convention on The Right of Child 1989 (UNHCR) Dimana setiap anak di dunia memiliki hak dalam Pendidikan.

Para pengungsi yang hidup di pengungsian dengan keterbatasan dan penantian selama bertahun-tahun menimbulkan masalah baru yaitu pendidikan bagi anak-anak pengungsi yang telah memasuki usia wajib belajar. Jika merujuk pada The United Nations Convention on The Right of Child 1989 (UNHCR) Dimana setiap anak di dunia memiliki hak dalam Pendidikan. Indonesia sebagai negara transit bagi banyak pengungsi yang ingin mencari suaka telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak tersebut melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Pemerintah Indonesia tidak melarang anak pengungsi mendapatkan pendidikan berupa '*home schooling*' di rumah penampungan. Selama di pengungsian, anak-anak pengungsi belajar tambahan dengan kedatangan guru-guru dari International Organization for Migration (IOM) dua kali dalam seminggu untuk belajar Bahasa Indonesia dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah (Simanjuntak, 2020).

Dalam pemenuhan hak anak pengungsi terhadap pendidikan, pemerintah Indonesia juga memberikan akses Pendidikan formal yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek terkait Pendidikan bagi Pengungsi Anak nomor 75253/A.A.4/HK/2019 tentang Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia yang ditujukan pada 9 Gubernur menjadi tempat transit para pengungsi, salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Di Pekanbaru terdapat 795 pengungsi hingga Maret 2023 yang berasal dari berbagai negara. Para pengungsi ini mendapatkan status sebagai pengungsi dari UNHCR dan akan ditampung di rumah penampungan atau biasa disebut "*Community House*", namun diantara mereka ada yang tinggal mandiri (tidak di tempat penampungan). Sebanyak 228 anak pengungsi di Kota Pekanbaru yang berusia dibawah 17 tahun dan beberapa dari mereka sudah memasuki usia wajib belajar. Dapat dilihat pada tabel di bawah, bahwa hanya sebahagian diantara mereka yang mengikuti pendidikan pada sekolah formal di Pekanbaru.

Meskipun upaya pendidikan secara formal telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pengungsi. Namun tersisa tantangan yang signifikan untuk mereka hadapi. Tantangan tersebut seperti kurangnya informasi dari sekolah secara jelas serta permasalahan di pengungsian yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan akses pendidikan (Snoubar, 2019), penyediaan dukungan yang terbatas, penempatan kelas yang tidak tepat, dan kurangnya dana untuk mendukung guru yang bekerja dengan anak-anak pengungsi di luar kontrak normal mereka (Trasberg & Kond, 2017). Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi anak-anak pengungsi dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan menghambat kemajuan pendidikan dan integrasi mereka ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, kurangnya biaya juga menjadi penghalang utama bagi anak-anak pengungsi untuk mengakses pendidikan, yang menyebabkan banyak anak putus sekolah (Zengin & Atasakdemir, 2020). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa keinginan dari anak dan orang tua pengungsi di Pekanbaru tidak memprioritaskan pendidikan selama di pengungsian (Wahyuni, 2023). Tantangan-tantangan ini memiliki dampak yang merugikan pada potensi anak-anak pengungsi di Pekanbaru. Tanpa dukungan dan sumber daya yang memadai, kebutuhan pendidikan anak-anak pengungsi di Pekanbaru tidak dapat sepenuhnya terpenuhi.

Menanggapi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak pengungsi. Berbagai strategi adaptasi telah diterapkan untuk memfasilitasi pendidikan mereka. Strategi ini termasuk menyediakan dukungan dan sumber daya khusus untuk anak-anak pengungsi, seperti diperbolehkannya masuk ke sekolah negeri pada tingkat dasar, menengah dan atas, program orientasi budaya untuk membantu mereka berintegrasi ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal telah dibentuk untuk memberikan dukungan tambahan dan menjembatani kesenjangan antara sekolah dan anak-anak pengungsi (Trasberg & Kond, 2017) (Gudovitch et al., 2021). Di Pekanbaru sendiri untuk biaya sekolah dibiayai oleh International Organization of Migration (IOM). Dukungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak pengungsi di Pekanbaru, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan yang mereka hadapi dan berkembang dalam perjalanan pendidikan mereka.

Dampak sosial dari pendidikan anak-anak pengungsi di Pekanbaru sangat signifikan. Akses terhadap pendidikan tidak hanya membekali anak-anak pengungsi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat dan berkontribusi kepada masyarakat (Snoubar, 2019). Selain itu, dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak pengungsi, kota

Pekanbaru dapat memperoleh manfaat dari beragam perspektif dan bakat yang mereka miliki. Anak-anak ini dapat menjadi jembatan antara budaya yang berbeda, memupuk pemahaman dan keharmonisan dalam masyarakat

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, strategi adaptasi seperti dukungan khusus sangat diperlukan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak pengungsi, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dan berhasil dalam pendidikan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi anak-anak pengungsi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan keberhasilan adaptasi mereka ke dalam sistem pendidikan di Pekanbaru.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Studi berkenaan Pendidikan untuk anak pengungsi telah banyak dilakukan diantaranya studi yang melihat tujuan dari Pendidikan pengungsi yang dipahami di Tingkat global, nasional dan sekolah oleh (Dryden-Peterson et al., 2019) dengan mengintegrasikan pengungsi ke dalam sistem Pendidikan nasional sebuah negara. Tujuannya memberikan akses kepada anak pengungsi Pendidikan yang berkualitas, kesempatan ekonomi dan rasa memiliki secara sosial. Studi tentang Pendidikan pengungsi ini memiliki implikasi untuk memahami tujuan Pendidikan dalam konteks ketidakpastian yang disebabkan migrasi, globalisasi dan teknologi.

Penelitian lain menyebutkan bahwa perhatian pada wacana dan praktik pendidikan multikultural bagi anak pengungsi dengan memperluas cakupan pendidikan multikultural dan pedagogi yang relevan secara budaya memberikan implikasi jangka panjang. Yaitu (a) memajukan peran hubungan lintas budaya dalam ruang pendidikan multikultural dan (b) menghilangkan perbedaan budaya dalam praktik Pendidikan multikultural bagi anak pengungsi (Amthor & Roxas, 2016).

Di Malaysia, tujuan eksplisit dari pendidikan pengungsi adalah untuk mempersiapkan anak pengungsi untuk masa depan pemukiman kembali. Tujuan ini dibuat sebagai tanggapan atas sangat terbatasnya untuk tinggal jangka panjang di Malaysia, yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi dan tidak memiliki sistem hukum untuk suaka tidak bisa tinggal di Malaysia (Dryden-Peterson et al., 2019). Malaysia belum meratifikasi konvensi PBB 1951 dan tidak menandatangani Protokol 1967 dimana anak-anak pengungsi tidak dapat mengakses sekolah umum (Thuraisingam, 2022).

Sedangkan negara lain seperti di Australia dan Selandia Baru, 89% siswa pengungsi terdaftar di sekolah-sekolah pemerintah. Para migran dan pengungsi yang berusia antara 16

dan 24 tahun menerima 510 jam pelajaran ESL dan tambahan 400 jam jika mereka adalah penyintas trauma dan penyiksaan atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Di Australia dan Selandia Baru, pendidikan bagi pengungsi dilakukan sedikit demi sedikit dan didominasi oleh pendekatan psikologis yang terlalu menekankan pada kondisi trauma pra-pengungsian (Matthews, 2008) (Anderson et al., 2023).

Pentingnya untuk mengkonseptualisasikan kembali pendidikan pengungsi sebagai inklusif dalam konteks pembelajaran yang beragam di dalam dan di luar sekolah dapat mendorong kolaborasi antara sekolah, LSM dan organisasi-organisasi lain untuk mendukung para anak pengungsi yang perlu menemukan jalan mereka ke dalam sistem sekolah yang baru dan masyarakat yang tidak dikenal (Pastoor, 2017). Partisipasi dalam berbagai konteks pembelajaran yang diperluas sangat penting dalam memungkinkan para pengungsi muda untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pendidikan serta untuk mengembangkan rasa memiliki dan mendukung kesempatan anak pengungsi untuk mencapai potensi mereka.

Ketika keluarga pengungsi mencoba untuk berpartisipasi dalam lingkungan dan komunitas multikultural yang mereka secara lokal, faktor-faktor seperti diskriminasi dan keterbatasan waktu dapat menghalangi kemampuan mereka untuk melakukannya. Dilema lain yang dihadapi keluarga pengungsi adalah benturan antara nilai-nilai budaya keluarga dan budaya populer di masyarakat yang menyebabkan keterasingan anak lebih lanjut antara benturan dua budaya (Isik-Ercan, 2012).

Oleh sebab itu sekolah menjadi aktor penting dalam mewujudkan tujuan Pendidikan bagi anak pengungsi. Sekolah berperan penting dalam menciptakan keadilan di mana ketidakadilan bisa datang dari dalam dan luar sekolah, sehingga pentingnya para pendidik mengidentifikasi dan menantang batasan dalam menciptakan keadilan bagi anak pengungsi (Keddie, 2012). Literatur menyoroti praktik "baik" dalam mendidik siswa dari latar belakang pengungsi cenderung berfokus pada tiga wacana khusus, yaitu lingkungan yang ramah dan tidak rasis, dukungan untuk siswa dalam hal kebutuhan psikososial dan trauma, dan penguasaan bahasa Inggris (Baak et al., 2023). Para guru percaya bahwa sekolah dan guru memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan mental remaja pengungsi dan masing-masing berkontribusi dengan cara yang unik. Namun, sekolah dan guru tidak selalu berhasil dalam mendukung remaja pengungsi dan guru melaporkan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakjelasan peran dan kurangnya sumber daya (McDiarmid et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2021). Sumber data primer berupa wawancara dengan 10 informan yaitu anak-anak pengungsi yang mengikuti Pendidikan formal di Kota Pekanbaru, guru yang mengajar anak-anak pengungsi di Kota Pekanbaru serta pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Adapun data sekunder pada penelitian ini bersumber dari Literatur ilmiah yang diakses dari *Publish or Perish* dan dokumen resmi yang dipublish oleh United Nations High Commissioner for Refugees dan website pemerintah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika melihat hasil penelitian efektifitas pelaksanaan pemberian Pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi (Shahrullah, Susetyo, Sudirman, & Sahputra, 2023) terdapat empat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi hal yang sama melalui pelaksanaan pendidikan anak pengungsi di kota Pekanbaru.

1. Faktor Hukum

Hukum menjadi bagian penting dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, sehingga menghasilkan keberhasilan dan efektifitas nantinya. Dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hak anak harus terpenuhi termasuk hak anak pengungsi luar negeri. Peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak pengungsi telah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum memiliki kebijakan pendidikan khusus yang mengatur hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum mengeluarkan pedoman yang memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Hal ini menghambat upaya menyediakan pendidikan inklusif bagi mereka.

Akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi menunjukkan bahwa adanya *gap* antara hukum Indonesia dan hukum internasional menyebabkan sulitnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, posisi Indonesia yang belum mengakui status pengungsi menyebabkan pemenuhan hak tidak berjalan secara maksimal. Anak-anak pengungsi di Indonesia telah tereksklusi dari dunia pendidikan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kesulitan bahasa menyebabkan mereka tidak dapat menyerap ilmu di sekolah secara maksimal. Hal ini juga membuat mereka cenderung tersisihkan dari kehidupan sosial di sekolah. Padahal, pemahaman bahasa sangatlah penting bagi anak-anak pengungsi, terutama yang ingin menuju Australia. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi kepada

praktisi di dunia pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa masalah *gap* hukum tidak dapat dihindari, namun setidaknya pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan kepada anak pengungsi karena sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Hidayat, 2022).

Selain itu, petunjuk teknis yang belum jelas mengenai pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi luar negeri. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi anak-anak pengungsi yang berada di Indonesia untuk menempuh pendidikan formal. Surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mampu untuk menjelaskan siapa yang bertanggungjawab mengenai pendidikan bagi anak-anak pengungsi ini. Peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak mengakomodir anak-anak pengungsi yang tidak memiliki ijazah ataupun sertifikat formal untuk menempuh pendidikan formal di tingkat lanjutan. Hal ini menghalangi mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan formal di masa depan.

2. Faktor Sarana

Di Pekanbaru, anak-anak pengungsi juga menghadapi kendala dalam hal ketersediaan dan kualitas sarana pendidikan. Selain Pendidikan formal di sekolah, anak pengungsi juga mendapatkan pendidikan informal dari mengandalkan fasilitas pendidikan non-formal dari IOM atau program komunitas. Sarana dan prasarana di fasilitas ini sering kali terbatas dalam hal ruang kelas, peralatan belajar, buku, dan alat tulis, sehingga pendidikan yang mereka terima kurang memadai dibandingkan dengan sekolah formal. Selain itu keterbatasan Bahasa pengantar bagi anak pengungsi. Sebagian besar anak pengungsi di Pekanbaru tidak fasih berbahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia. Tidak tersedianya program pengajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari pendidikan bagi anak pengungsi mengakibatkan kendala dalam memahami materi yang diajarkan.

Keterbatasan dalam hal ini diawali karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mutlak digunakan oleh anak-anak pengungsi jika mereka ingin bersakolah di sekolah formal. Kurangnya pemahaman anak-anak pengungsi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, baik itu dari penyampaian materi oleh guru di sekolah formal, maupun materi yang didapat anak-anak pengungsi dari buku cetak dan sejenisnya yang berbahasa Indonesia yang membuat anak-anak pengungsi sulit untuk mengikuti. Hanya beberapa mata pelajaran yang mampu anak-anak pengungsi untuk memahami dan mendapatkan nilai baik, yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Mata pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia, sulit untuk mereka mengikutinya dikarenakan untuk memahami mata pelajaran

tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadikan proses pembelajaran menjadi terhambat dan anak-anak pengungsi enggan untuk melanjutkan sekolah sekolah.

Selain itu, juga terdapat keterbatasan tenaga pengajar yang ada pada saat ini yang mana tenaga pengajar di sekolah formal hanya mampu memberikan pengajaran kepada anak-anak pengungsi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Penggunaan Bahasa Inggris pun terkadang anak pengungsi mengalami kendala, seperti yang diketahui bahwa pengungsi yang masuk ke Pekanbaru pada umumnya berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Asia Barat.

Anak-anak pengungsi juga memiliki kecenderungan untuk berada di tingkat kelas yang lebih tinggi. Standar usia anak sekolah formal di bangku SD kelas 1 di Indonesia adalah 6 atau 7 tahun. Sedangkan anak-anak pengungsi yang bersekolah di SD kelas 1 ada yang berusia lebih dari 8 tahun. Sehingga anak-anak pengungsi menginginkan mereka untuk diletakkan dikelas yang sesuai dengan usia mereka. Hal ini juga didukung dengan postur tubuh dari anak-anak pengungsi tersebut yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak Indonesia. Sedangkan aturan di sekolah formal adalah pendidikan dimulai dari kelas 1 terlebih dahulu meskipun jika dilihat dari umur anak tersebut seharusnya ada di kelas yang lebih tinggi. Keinginan inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk terus memberikan semangat kepada anak-anak pengungsi agar tetap ingin bersekolah.

3. Faktor Masyarakat

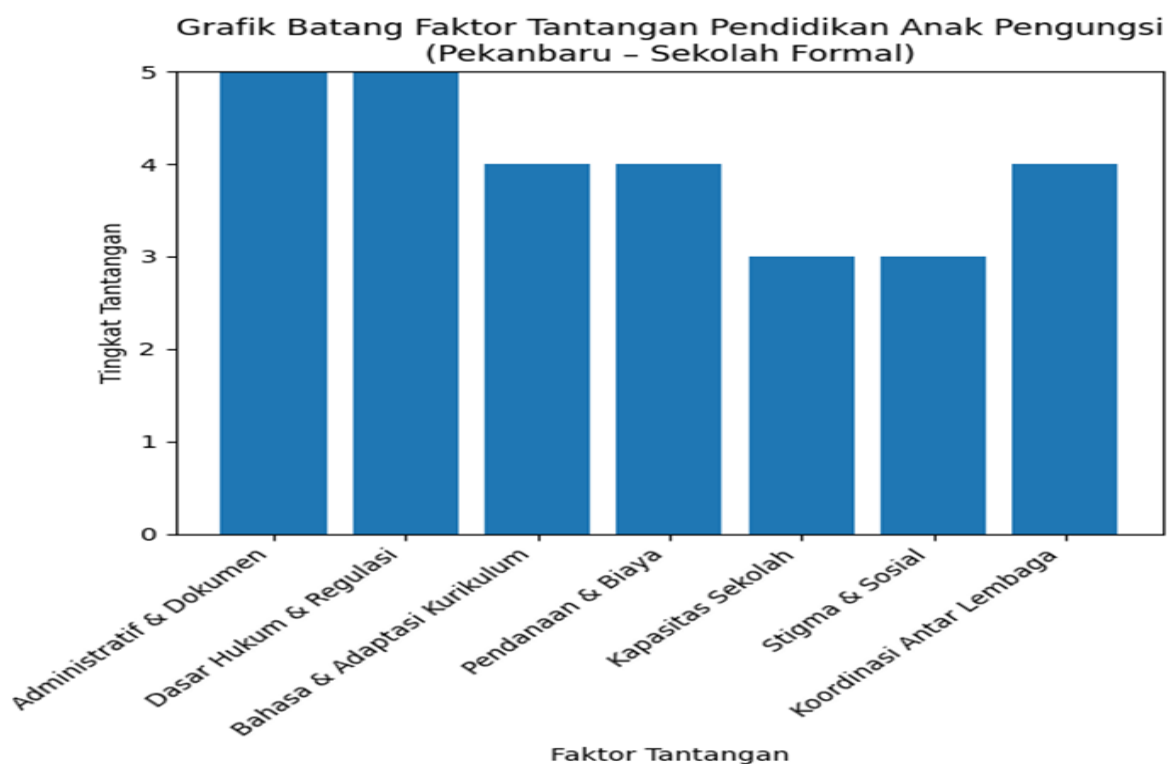
Dalam konteks pendidikan anak pengungsi di Pekanbaru, faktor masyarakat juga memegang peranan penting yang dapat menjadi hambatan dalam proses belajar-mengajar mereka. Sebagian masyarakat di Pekanbaru kurang memahami situasi anak-anak pengungsi dan tidak terbiasa dengan kehadiran mereka. Kurangnya pemahaman dan empati ini bisa menyebabkan diskriminasi atau ketidaksukaan, yang membuat anak pengungsi merasa tidak diterima. Situasi ini dapat berdampak negatif pada psikologis anak-anak pengungsi dan menurunkan semangat belajar mereka.

Selain itu, pengungsi sering kali menghadapi stereotip atau stigma negatif yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa mereka tidak permanen atau bahkan dapat membawa masalah sosial. Stigma ini dapat membuat anak-anak pengungsi merasa terisolasi dan tidak nyaman saat berinteraksi dengan anak-anak lokal, yang dapat menghambat integrasi mereka dalam lingkungan pendidikan dan aktivitas sosial. Adanya perasaan “*di-bully*” yang dirasakan oleh anak-anak pengungsi. Sebagian anak-anak pengungsi ada yang merasakan bahwa mereka mengalami “*pem-bully-an*” selama belajar di sekolah formal. Berdasarkan hasil penelitian, perasaan *bully* yang mereka rasakan bukanlah *bully* yang seperti menggunakan fisik atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, melainkan perasaan anak-anak pengungsi

yang merasa di *bully* karena mereka selalu menjadi sorotan oleh anak-anak lokal setiap mereka ada sekolah, sedangkan pandangan dari anak-anak lokal tersebut bukanlah dimaknai negatif oleh anak-anak lokal melainkan anak-anak lokal masih merasa asing dengan kehadiran mereka disekolah mereka melihat postur tubuh anak-anak pengungsi yang tinggi, kulitnya yang jika putih sangat putih jika kulitnya gelap sangat gelap, atau melihat bentuk hidung yang mancung. Tapi yang dirasakan anak-anak pengungsi justru sebaliknya.

4. Faktor Kebudayaan

Anak pengungsi sering kali datang dari negara atau komunitas dengan nilai-nilai budaya yang berbeda dari budaya lokal di Pekanbaru. Perbedaan dalam cara berpakaian, makanan, tata krama, dan kebiasaan sehari-hari dapat menciptakan jarak antara anak-anak pengungsi dan teman sebayanya. Hal ini kadang membuat mereka merasa terasing dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Perbedaan budaya bisa menimbulkan konflik antar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidaktahuan tentang budaya satu sama lain atau salah paham terhadap kebiasaan tertentu bisa menyebabkan konflik kecil yang membuat anak pengungsi merasa tidak aman dan tidak nyaman di sekolah. Konflik ini juga bisa menghambat integrasi mereka ke dalam lingkungan sekolah dan kecenderungannya akan berteman dengan sesama pengungsi saja meskipun mereka berada di lingkungan sekolah formal yang mana banyak terdapat anak-anak lokal.



Selain itu, Kurangnya kepedulian orang tua anak pengungsi mengenai pendidikan anaknya. Sikap yang ditampilkan oleh orang tua anak-anak pengungsi terdapat perbedaan antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, ada sikap orang tua dari anak pengungsi yang peduli terhadap pendidikan anak mereka sehingga selalu mengusahakan apapun untuk pendidikan anaknya, seperti mengizinkan anak-anak mereka untuk bersekolah, mengantarkan dan menjemput anak-anak mereka ke sekolah, bahkan membantu anak-anak mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolahnya. Namun, juga terdapat kondisi yang berbeda dari itu, ada orang tua yang cuek terhadap pendidikan anak-anak mereka. Bagi orang tua anak-anak pengungsi tersebut, tidak ada manfaat yang akan mereka terima jika anak-anak mereka bersekolah di sekolah formal. Hal ini dikarenakan kondisi keadaan mereka yang tidak tentu di Indonesia ini. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan berada di negara Indonesia sehingga pendidikan di sekolah formal dirasa tidak perlu dilakukan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu anak-anak pengungsi tersebut lebih sering diajak untuk ikut bekerja bersama orang tua mereka dibandingkan harus mengikuti pendidikan di sekolah. Karena bagi orang tua mereka, anak-anak lebih tepat untuk ikut bekerja bersama orang tuanya daripada harus mengikuti pendidikan di sekolah.

Strategi Adaptasi Pendidikan Anak Pengungsi di Pekanbaru

Pendidikan anak pengungsi luar negeri di Pekanbaru, seperti di banyak tempat lainnya, memerlukan pendekatan adaptasi yang melibatkan berbagai aktor yang bekerja bersama untuk mengatasi tantangan yang ada. Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau di Indonesia, tidak terkecuali dalam menghadapi dinamika pendidikan anak-anak pengungsi, baik yang berasal dari wilayah konflik seperti Afghanistan, Suriah, atau negara-negara lain. Strategi adaptasi pendidikan di tempat seperti ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi internasional, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait. Setiap aktor berkontribusi dalam memastikan bahwa anak-anak yang terdampak konflik atau bencana yang singgah di Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

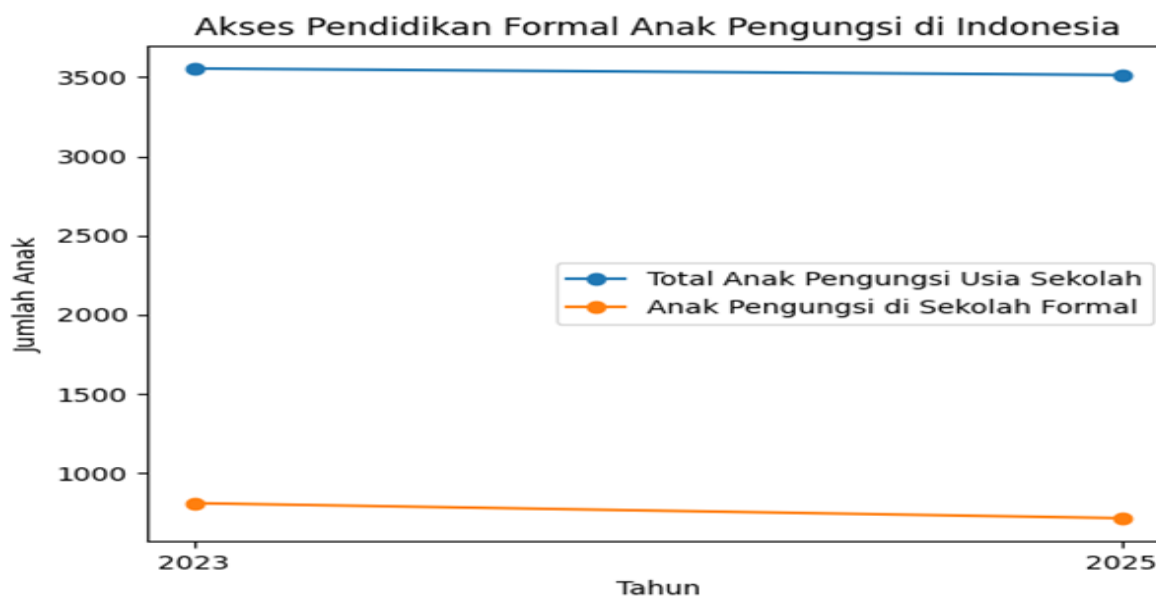
Tabel 1. Jumlah Anak Pengungsi di Indonesia Bulan Mei-Juni 2025

Keterangan	Anak Pengungsi terdaftar (0-17 Tahun)
Anak Bersama orang tua/asuh	3.278
Anak Tanpa Pendamping Orang Tua Dewasa	157
Anak Terpisah dari Orang Tua	79
Anak Pengungsi yang Terdaftar di Sekolah Negeri Terakreditasi	713

Sumber: unhcr.org

Data ini mencerminkan situasi secara nasional. UNHCR mencatat total anak pengungsi yang bersekolah formal di Indonesia sekitar 713 anak, dari lebih 3.500 anak pengungsi yang terdaftar dengan UNHCR. Ini menunjukkan bahwa rasio akses pendidikan formal masih rendah, hanya sekitar 20–25 % dari seluruh anak pengungsi usia sekolah mendapatkan akses di sekolah nasional.

Grafik 1. Grafik Akses Pendidikan Formal Anak Pengungsi



Berikut adalah beberapa aktor yang berperan dalam pendidikan anak pengungsi di Pekanbaru Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, IOM, UNHCR, Pihak Sekolah, Orang Tua, dan Anak Pengungsi. Para aktor ini berperan pada ruang yang berbeda, disini akan dijelaskan bentuk strategi kolaborasi dalam proses adaptasi Pendidikan anak pengungsi di Pekanbaru. Berikut beberapa strategi yang telah diterapkan dalam proses adaptasi anak pengungsi dalam proses pembelajaran.

Perumusan Kebijakan Umum

Menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban hukum, baik nasional maupun internasional, terkait hak atas pendidikan. Ini adalah langkah nyata dalam mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan memperkuat citra negara sebagai negara yang inklusif dan peduli terhadap kemanusiaan.

Dinas pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak pengungsi, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan mendistribusikan anak-anak pengungsi ke sekolah-sekolah negeri, mereka diberi kesempatan yang sama dengan siswa lokal untuk belajar dan berkembang secara akademis. Salah satu tujuan penting adalah membantu anak-anak pengungsi berintegrasi dalam masyarakat setempat. Dengan belajar di

sekolah-sekolah negeri, anak-anak pengungsi memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lokal, memahami budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat, serta membangun jaringan sosial yang positif.

Untuk anak-anak pengungsi di Pekanbaru yang ingin bersekolah di sekolah negeri terdapat tiga sekolah umum negeri di Indonesia, yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Untuk proses pendistribusiannya, Dinas Pendidikan Provinsi berperan dalam mendistribusikan anak pengungsi ke Sekolah Menengah Atas sedangkan Dinas Pendidikan Kota berperan dalam mendistribusikan anak pengungsi ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar. Pendistribusian anak-anak pengungsi berdasarkan kedekatan sekolah dengan rumah detensi imigrasi (rudenim). Keputusan ini diberitahukan kepada pihak IOM yang bekerjasama dengan pihak sekolah dalam proses pembelajaran selanjutnya.

Program anak pengungsi mengakses pendidikan formal dimulai sejak tahun 2019. Tidak ada syarat khusus bagi anak-anak pengungsi yang ingin masuk sekolah kecuali mereka bisa dan mengerti Bahasa Indonesia. Adapun untuk penempatan kelas, dinas menyerahkan kepada IOM untuk menyeleksi. Beberapa di antaranya adalah syarat pengungsi anak dapat mengakses pendidikan formal, yakni memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Kedua, mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi. Terakhir, memiliki surat rekomendasi dari lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah (Shalsadilla, 2023).

Anak-anak pengungsi memasuki sekolah di Pekanbaru tidak pada tahun ajaran baru, namun masuk sesuai dengan penugasan dinas pada sekolah dan rekomendasi IOM. Selama proses pembelajaran anak-anak pengungsi menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah, berbaur dengan anak lainnya dan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru. Akses untuk bersekolah di sekolah negeri masih tetap mengutamakan anak lokal. Meski berhak ikut ujian, anak pengungsi tidak akan mendapatkan ijazah apabila lulus sekolah.

Anak-anak pengungsi diperlakukan sama dengan anak sekolah lainnya. Mereka menempati kelas yang sama berdasarkan kualifikasi umur dan kemampuan berbahasa Indonesia. Anak pengungsi bersosialisasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama. Penggabungan ini bertujuan untuk membantu anak-anak pengungsi beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Melalui interaksi sehari-hari di sekolah, mereka belajar bahasa, nilai-nilai sosial, dan budaya lokal, yang memudahkan mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat.

Ketika anak-anak lokal dan pengungsi belajar bersama, mereka mendapatkan kesempatan untuk memahami dan menghargai perbedaan latar belakang budaya, agama, atau bahasa. Hal ini membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, serta membangun sikap toleransi dan saling menghargai di antara mereka. Berada dalam lingkungan yang beragam memungkinkan siswa untuk saling belajar tentang pengalaman hidup yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan empati, wawasan global, dan kemampuan berpikir kritis siswa, yang akan menjadi bekal penting dalam kehidupan mereka di masa depan.

Anak-anak lokal juga mendapatkan manfaat dari keberagaman ini, karena mereka dapat mempelajari budaya, bahasa, dan perspektif baru dari teman-teman pengungsi. Pengalaman ini dapat memperluas wawasan mereka, memperkaya pemahaman mereka tentang dunia, dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural. Dengan belajar bersama, siswa lokal dan pengungsi dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Mereka akan belajar pentingnya saling mendukung dan tolong-menolong, terutama ketika menghadapi tantangan. Solidaritas ini menjadi bekal untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan saling peduli.

Penggabungan anak pengungsi dengan anak lokal dalam pendidikan formal adalah bagian dari upaya untuk memberikan hak atas pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak, sesuai dengan standar hak asasi manusia dan konvensi internasional. Hal ini memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke pendidikan hanya karena status mereka sebagai pengungsi.

Selain itu, anak pengungsi luar negeri yang bersekolah di sekolah negeri, tidak harus mendaftar pasca PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) karena mereka hanya bisa mengisi kursi kosong ketika PPDB usai digelar. Anak-anak pengungsi tersebut mendaftar dengan menggunakan nomor status pengungsi yang dikeluarkan UNHCR, karena tidak mungkin memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Adapun poin poin yang perlu direvisi dari SE tersebut yaitu surat keterangan lulus bagi anak-anak pengungsi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten/Provinsi (Kurniati & Dzulviqor, 2022).

Pendataan anak pengungsi ini juga bertujuan memantau perkembangan mereka secara berkala dengan akurat serta melihat konsistensi mereka dalam hadir dan melanjutkan pendidikan. Tidak jarang anak pengungsi tiba-tiba memutuskan berhenti sekolah ditengah tahun ajaran dengan alasan tertentu, pindah pengungsian dan atau telah ditetapkan negara tujuan yang akan mereka datangi. Pendataan dan evaluasi program pendidikan bagi pengungsi ini penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang positif dan menyesuaikan strategi jika ada tantangan baru.

Dalam proses Pendidikan di sekolah formal di Pekanbaru, anak pengungsi sepenuhnya menjadi tanggungjawab IOM mulai dari seragam, buku, peralatan sekolah hingga SPP dan iuran lainnya. IOM memastikan bahwa anak-anak pengungsi dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan formal dan mendapatkan dukungan yang diperlukan agar mereka bisa berkembang secara akademis, sosial, dan emosional. IOM membantu memfasilitasi pendaftaran anak-anak pengungsi di sekolah-sekolah lokal. Hal ini bisa termasuk membantu pengungsi memahami persyaratan dan proses pendaftaran di negara tuan rumah dan IOM menyediakan program penguatan bahasa, seperti kelas tambahan bahasa Indonesia dan/atau Inggris, yang memungkinkan anak-anak pengungsi untuk memahami materi pelajaran serta berkomunikasi dengan guru dan teman-teman mereka, kegiatan ini merupakan pendidikan informal yang diberikan kepada anak pengungsi dengan mendatangkan guru ke rudenim. IOM memberikan bantuan dalam bentuk buku, seragam, alat tulis, dan bahan pendidikan lain yang dibutuhkan oleh anak-anak pengungsi agar mereka dapat belajar secara efektif. Bantuan ini memastikan bahwa anak-anak pengungsi memiliki sumber daya yang sama seperti siswa lokal sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan tanpa kendala finansial. IOM juga mendukung program ekstrakurikuler di sekolah yang melibatkan anak-anak pengungsi untuk mendorong interaksi sosial dengan siswa lokal. Kegiatan seperti olahraga, seni, atau klub bahasa ini membantu anak-anak pengungsi untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun rasa percaya diri, dan mempererat hubungan dengan teman sebaya mereka.

Mengevaluasi efektivitas program pendidikan yang telah diterapkan untuk anak-anak pengungsi, termasuk keberhasilan pengajaran dan pencapaian akademis mereka. Monitoring memungkinkan untuk menilai apakah program pendidikan untuk anak-anak pengungsi mencapai tujuannya. Ternyata Kurikulum yang diajarkan pada anak-anak pengungsi di sekolah non-formal yang mereka dapatkan di rudenim tidak disamakan dengan kurikulum di sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia (Shalehah & Nur, 2021).

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pengungsi dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan formal di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kendala hukum, keterbatasan fasilitas pendidikan, perbedaan bahasa, serta ketidaksetaraan akses ke sekolah negeri. Selain itu, anak-anak pengungsi juga menghadapi hambatan sosial dan budaya, seperti diskriminasi, stigma, serta kurangnya dukungan masyarakat lokal. Hambatan ini menyebabkan anak-anak pengungsi kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak lokal dan pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah formal

dan tetap menjalankan pendidikan informal yang diberikan oleh IOM di rumah detensi imigrasi.

Strategi adaptasi dalam proses pendidikan yang diberikan pemerintah Indonesia ternyata tidak begitu efektif membawa inklusifitas pendidikan bagi anak pengungsi di kota Pekanbaru. Daya tarik pendidikan formal yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak serta merta membuat orang tua pengungsi dan anak pengungsi menjalankan Pendidikan dengan antusias. Namun, apresiasi yang tinggi bagi pemerintah yang selama ini memperjuangkan Pendidikan bagi anak pengungsi disamping banyaknya permasalahan yang juga harus diselesaikan pemerintah terkait Pendidikan di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Umikalsum, & Fauzan. (2019). Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat. *Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat JAWI*, 2(1), 65–86.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawiDOI:http://dx.doi.org/10.24042/jw.v2i1.2841>
- Amthor, R. F., & Roxas, K. (2016). Multicultural Education and Newcomer Youth: Re-Imagining a More Inclusive Vision for Immigrant and Refugee Students. *Educational Studies*, 52(2), 155–176. <https://doi.org/10.1080/00131946.2016.1142992>
- Anderson, V., Ortiz-ayala, A., Mostolizadeh, S., Anderson, V., Ortiz-ayala, A., May, S. M., Anderson, V., & Ortiz-ayala, A. (2023). Schools and teachers as brokers of belonging for refugee-background young people. *International Journal of Inclusive Education*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2210591>
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baak, M., McDonald, S., Johnson, B., & Sullivan, A. (2023). Why school context matters in refugee education. *Educational Research for Policy and Practice*, 22(2), 283–299. <https://doi.org/10.1007/s10671-023-09338-3>
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran edisi 4*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Dryden-Peterson, S., Adelman, E., Bellino, M. J., & Chopra, V. (2019). The Purposes of Refugee Education: Policy and Practice of Including Refugees in National Education

-
- Systems. In *Sociology of Education* (Vol. 92, Issue 4).
<https://doi.org/10.1177/0038040719863054>
- Gudovitch, R., Alex, G., Kiyangi, E., Barigye, E., Zawedde, M., Namu-Gambe, A., Mutesi, F., Forshtat, L., & Slonim-Nevo, V. (2021). Teachers' perspectives: Challenges in the integration of refugee children deported from Israel to Uganda. *Social Sciences*, 10(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/socsci10030091>
- Hendry Ar., E. (2013). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 191. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.242>
- Indri, N., Harahap, Y., Hanani, S., Iqbal, M., Pratama, A. R., Manajemen, P., Islam, P., Islam, U., Sjech, N., Bukittinggi, D., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2024). *Peran Pendidikan Islam dalam Mempertahankan Integrasi Sosial : Pandangan Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*. 3(1).
- Isik-Ercan, Z. (2012). In Pursuit of a new perspective in the education of children of the refugees: Advocacy for the “Family.” *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 12(SUPPL. 4), 3025–3038.
- Keddie, A. (2012). Refugee education and justice issues of representation, redistribution and recognition. *Cambridge Journal of Education*, 42(2), 197–212. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2012.676624>
- Li, C. (2022). Psychological Factors and Innovation Performance of Scientific and Technological Personnel: The Mediating Role of Proactive Behavior and the Moderating Role of Organizational Support. *Scientific Programming*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5886648>
- Lakey, B., & Cohen, S. (2000). Social Support and Theory. In S. Cohen, L. G. Underwood, & B. H. Gottlieb (Eds.), *Social Support Measurement and Intervention: A Guide for Health and Social Scientists* (pp. 29-52). New York: Oxford University Press.
- Matthews, J. (2008). Schooling and settlement: Refugee education in Australia. *International Studies in Sociology of Education*, 18(1), 31–45. <https://doi.org/10.1080/09620210802195947>
- Mcdiarmid, S., Durbeej, N., & Sarkadi, A. (2022). Schools' and teachers' roles and challenges in supporting the mental wellbeing of refugee youths : a qualitative study with Swedish teachers. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 17(1). <https://doi.org/10.1080/17482631.2021.2007568>
- Nordin, M. (2015). Social Support: Health Benefits from Social Relations. https://doi.org/10.1057/9781137437853_2, 13-19.

- Pastoor, L. de W. (2017). Reconceptualising refugee education: exploring the diverse learning contexts of unaccompanied young refugees upon resettlement. *Intercultural Education*, 28(2), 143–164. <https://doi.org/10.1080/14675986.2017.1295572>
- SNOUBAR, Y. (2019). Direct Social Work Practice With Refugee Children From the Middle East: an Academic Perspective. *Journal of International Social Research*, 12(65), 1241–1248. <https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3533>
- Simanjuntak, J. M. (2020). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 76-90.
- Thoits, P. A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. *Journal of Health and Social Behavior*, 52(2), 145–161. <https://doi.org/10.1177/0022146510395592>
- Thuraisingam, T. (2022). a Systematic Review of Refugee Education in Malaysia. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 50. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20289>
- Trasberg, K., & Kond, J. (2017). Teaching New Immigrants in Estonian Schools - Challenges for a Support Network. *Naujujų Imigrantų Mokymas Estijos Mokyklose - Iššūkiai Palaikymo Tinklams.*, 38, 90–100. <http://10.0.60.28/ActPaed.2017.38.10793%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=125004643&site=ehost-live>
- Torro, S., Gardono, I., & Rahman, A. (2014). Integrasi Sosial dan Asimilasi, Simpul-Simpul Sosial pada Masyarakat Majemuk di Indonsia. Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Wahyuni, W. (2023). Implementasi Program Pendidikan Formal Untuk Anak Pengungsi Oleh Dinas Pendidikan Di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Yoshany, N., Morowatisharifabad, M. A., Sharma, M., Jambarsang, S., Bahri, N., Sadeghi, R., & Hanna, F. (2022). Predictors of regular physical activity behavior and quality of life in post-menopausal Iranian women based on the multi-theory model. *Journal of Medicine and Life*, 15(3), 408–414. <https://doi.org/10.25122/jml-2021-0073>
- ZENGİN, M., & ATAŞ AKDEMİR, Ö. (2020). Teachers' Views on Parent Involvement for Refugee Children's Education. *Journal of Computer and Education Research*, 8(15), 75–85. <https://doi.org/10.18009/jcer.649547>